

DINAMIKA HUBUNGAN INTEGRASI EKONOMI TERHADAP NEGARA KESEJAHTERAAN DI EROPA STUDI KASUS: NORWEGIA

Oleh:

RIDHO WIRAWAN

(Alumni Departemen Hubungan Internasional Fisip Universitas Hasanuddin)

Abstract

This article aims to discern the implementation economic integration in the Welfare State, particularly in Norway. This research also head to analyze the ramifications and consequences of economic integration implementation in Norway. This thesis exercises the analytical-descriptive method of research. The descriptive method engaged to describe the implementation of EFTA rules within Norway and analyze it's consequences. This research utilize various datum from literature, books, official document, and news and report from various media.

Influence of free trade actually have differences in contrast with the applied welfare state system by Norway. Free trade is based on the country that is not overly intervene in the market policy, incompatible with the welfare state system that indicate the orientation of a strong government in regulating the distribution of welfare. On the other hand, this pattern has been running and ensure equitable distribution of wealth throughout the population for years. EFTA dwell on the influence of trade tariffs, taxation and bureaucratic procedures of foreign companies as well as large market competition, making their conflicts of interest and policy with the Norwegian government.

Keywords : *Economic Integration , EFTA , Norway , the Welfare State*

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses integrasi ekonomi yang terjadi terhadap negara yang menerapkan sistem Negara Kesejahteraan, serta pengaruhnya terhadap sistem ini sendiri. Dalam kasus ini, integrasi ekonomi yang dimaksud adalah *EFTA (European Free Trade Area)*, yang merupakan satu-satunya integrasi ekonomi yang diterapkan di Norwegia. Disamping itu juga menjelaskan karakteristik negara kesejahteraan dalam melaksanakan sistem ekonomi politiknya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-analisis dengan EFTA dan Norwegia sebagai studi kasus. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana implementasi aturan EFTA di Norwegia dan kemudian menganalisis bagaimana dampak dari implementasi aturan tersebut terhadap kebijakan yang dilakukan Norwegia sebagai Negara Kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan data-data berupa kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, dan berita dari media.

Pengaruh perdagangan bebas sebenarnya memiliki perbedaan kontras dengan sistem negara kesejahteraan yang diterapkan oleh Norwegia. Perdagangan bebas yang berdasar pada negara yang tidak terlalu turut campur tangan dalam kebijakan pasar, tidak sesuai dengan sistem negara kesejahteraan ini yang

mengindikasikan adanya orientasi pemerintah yang kuat dalam mengatur distribusi kesejahteraannya. Namun disisi lain, pola ini telah berjalan dan memastikan distribusi kesejahteraan merata keseluruh penduduk selama bertahun-tahun. Pengaruh EFTA berkuat pada tarif perdagangan, pajak dan birokrasi perusahaan asing serta persaingan pasar yang besar, menjadikan adanya tarik-menarik kepentingan dan kebijakan dengan pemerintah Norwegia.

Kata Kunci: *Integrasi Ekonomi, EFTA, Norwegia, Negara Kesejahteraan*

PENDAHULUAN

Dalam fenomena hubungan internasional, kerjasama antar negara semakin mengalami dinamika. Seiring semakin terbukanya jalur kerjasama antar negara, semakin beragam pula pola kerjasama yang dilakukan. Bentuk-bentuk kerjasama ini kemudian terbagi dalam kerjasama bilateral, multilateral, regional, serta antar regional. Hubungan kerjasama ini memperlihatkan pola-pola kerjasama yang telah mencakup keseluruhan bidang kehidupan. Baik politik, keamanan, ekonomi, pendidikan serta sosial budaya, hampir keseluruhan negara telah menerapkan kerjasama di bidang-bidang tersebut.

Pada bidang ekonomi, kerjasama internasional ini memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat pasca perang dingin. Saat ini telah semakin banyak negara yang memutuskan untuk membentuk perjanjian, rezim, dan bahkan organisasi internasional dalam bidang ini. Hal ini memperlihatkan bahwa fokus dunia internasional tidak lagi berkuat pada keamanan namun lebih pada kesejahteraan ekonomi.

Kerjasama ekonomi seperti kerjasama pada bidang yang lain, juga memiliki bentuk-bentuk yang berbeda untuk tiap tingkatan kerjasama. Contohnya di Eropa telah terbentuk kerjasama ekonomi yang beragam seperti Perjanjian EEA (Eroupean Economic Area) dan EFTA (European Free Trade Area). Dalam hal ini kerjasama ekonomi ini berbentuk kerjasama regional dan aturan yang didalamnya berlaku untuk seluruh anggota di dalamnya.

Salah satu negara di Benua Eropa yang tergabung dalam integrasi ekonomi regional ini adalah Norwegia. Walaupun menjadi salah satu negara yang menolak untuk bergabung dalam Uni Eropa, Norwegia tetap tergabung dalam *EFTA* (Norwegia bergabung pada tahun 1960) dan *EEA* bersama negara-negara Eropa yang lainnya. Walaupun tidak terdaftar sebagai anggota Uni Eropa, Norwegia tetap tergabung dalam regulasi pasar tunggal Eropa. Perjanjian Wilayah Ekonomi Eropa (*EEA Agreement*) mulai diberlakukan pada tahun 1994.¹ Sehingga pada saat itu Norwegia telah berhak mengakses pasar tunggal Eropa. Sebagai negara anggota *EEA/EFTA*, Norwegia diharuskan patuh terhadap

¹Norway the EEA Agreement and Norways other agreements with the EU, dari http://www.eu-norway.org/news1/Norway-the-EEA-Agreement-and-Norways-other-agreements-with-the-EU/#.UnvZ_BCpdic, diakses pada tanggal 20 Oktober 2013 pukul 22.30 wita

perjanjian pasar bebas yang diterapkan di Eropa. Hal ini mengindikasikan arus barang bebas keluar dan memasuki wilayah Norwegia tanpa proteksi dan pajak yang tinggi.

Peran sebuah negara adalah menjamin kesejahteraan rakyat melalui regulasi serta kebijakannya. Pencapaian kesejahteraan ini dapat dicapai selain melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi negara tersebut juga didukung oleh pemerataan sosial di dalamnya. Norwegia adalah salah satu negara yang berhasil memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dengan GDP per kapita Norwegia yang mencapai \$55,900 pada tahun 2012.²

Selain berhasil mencapai predikat sebagai negara maju yang cukup makmur, Norwegia juga berhasil melakukan pemerataan sosial yang berbentuk pengeluaran sosial. Pengeluaran sosial ini ditujukan demi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material kepada seluruh masyarakat Norwegia tanpa terkecuali. Hal ini dapat dilihat dari pengeluaran belanja sosial Norwegia mencapai 29,7 % dari total GDP.³ Hal ini membuktikan bahwa Norwegia berhasil menjalankan proses pembangunan kesejahteraan. Keberhasilan pembangunan kesejahteraan ini menjadi karakteristik Norwegia sebagai negara kesejahteraan atau *welfare-state*.

Negara kesejahteraan atau *welfare-state* merupakan kondisi dimana suatu negara berhasil melakukan pengorganisasian kesejahteraan di negaranya. Tidak hanya hal itu, negara kesejahteraan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.⁴ Sehingga pelayanan yang dilakukan di negara kesejahteraan harus menyentuh setiap individu tanpa terkecuali. Di Norwegia proses ini telah berjalan yang dimana pelayanan sosial diberikan secara merata baik kaya atau miskin. Model pengoperasian negara kesejahteraan yang digunakan Norwegia adalah model universal. Model ini sering disebut sebagai *the Scandinavian Welfare States* yang diwakili oleh Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia.⁵

Pengeluaran sosial yang dikeluarkan oleh Norwegia, sebagian besar berasal dari pajak yang dipungut yang menjadi pemasukan paling cukup besar di Norwegia. Hasil pungutan dari pajak besarnya mencapai 57% dari GDP.⁶ Hal ini dimungkinkan karena jumlah pajak yang dipungut di Norwegia cukup tinggi.

²*The World Fact Book : Norway*, dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/no.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2013 pada pukul 22.41 Wita

³*Ibid*

⁴Judith Bessant, Rob Watts, Tony Dalton dan Paul Smith..*Talking Policy: How Social Policy in Made*, Crows Nest: Allen and Unwin 2006. dalam artikel Edi Suharto. *Peta dan Dinamika Welfare-State di Beberapa Negara*.2006, hal. 4

⁵*Ibid*. Hal.6

⁶<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/no.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober pada pukul 22.41 Wita











Salah satu contohnya adalah pada pajak korporasi yang sangat tinggi, berkisar antara 2% hingga 30% sesuai dengan jenis usahanya.⁷ Hal ini agak sedikit bertentangan dengan semangat pasar bebas yang dianut oleh *EEA/EFTA* yang menekankan bahwa tarif dan hambatan lainnya itu harus diminimalisir.

PEMBAHASAN

A. Norwegia sebagai negara kesejahteraan

Seratus tahun yang lalu, Norwegia merupakan salah satu negara miskin di Eropa. Norwegia saat ini berada di peringkat salah satu negara-negara terkaya di dunia. PDB per kapita Norwegia adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Berikut ini adalah gambaran mengenai Negara-negara dengan tingkat PDB per kapita tertinggi didunia.

Tabel 1: Tingkat PDB per kapita Negara-negara dunia versi World Bank tahun 2014

Rank	Country	U S \$
1	 Luxembourg	110.665
2	 Norway	97.363
—	 Macau	96.444
3	 Qatar	93.397
4	 Switzerland	84.733
5	 Australia	61.887
6	 Denmark	60.634
7	 Sweden	58.887
8	Singapore	56.286
9	 United States	54.629
10	 Ireland	53.313

Sumber : Data diolah dari situs The World Bank , GDP per capita <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries/1W?display=default>, pada tanggal 6 Desember 2014, pukul 19.00

Tingkat pendapatan perkapita yang tinggi ini mencerminkan Norwegia sebagai salah satu Negara yang berhasil meningkatkan kesejahteraan pada masyarakatnya. Pendapatan besar dari sumber daya alam, seperti pembangkit listrik tenaga air, perikanan dan minyak bumi sejak awal 1970, menjelaskan

⁷ KPMG LAW ADVOKATFIRMA DA, *Tax Facts Norway 2013: A survey of the Norwegian Tax System*, KPMG AS, Oslo. 2013, hal.12

bagaimana norwegia menjadi Negara dengan ekonominya yang berkembang pesat.⁸ Namun peningkatan kesejahteraan ini tidak serta-merta berasal dari sumber daya itu saja, namun juga ditopang oleh sistem pemerataan kesejahteraan di negaranya. Hal ini dicapai melalui penerapan *system welfare state* atau Negara kesejahteraan di Norwegia.

Negara kesejahteraan Norwegia dicirikan dengan tanggung jawab yang tinggi oleh pemerintahnya. Persentase pembiayaan pemerin tahan federal, daerah dan kotamadya sangat besar pada tujangan dan belanja sosial sertapengawasan pemenuhannya dengan regulasi sistem. Tujuannya adalah untuk mencapai perlakuan yang sama dan setara kepada seluruh pendudukserta distribusi tunjangan sosial yang setara dan adil. Dalam berbagai masyarakat, keluarga memiliki tanggung jawab utama untuk membantu anggota keluarga yang membutuhkan.

Negara kesejateraan menjamin masyarakatnya dengan manfaat tunjangan sosial yang sangat banyak. Tetapi sangatlah penting untuk tetap sadar akan fakta bahwa penduduk di negara kesejahteraan juga memiliki tanggung jawab. Sebuah kondisi yang sangat penting demi agar negara kesejahteraan berfungsi efektif adalah kepercayaan.⁹

Seluruh kotamadya di Norwegia memilki kantor Layanan Tenaga Kerja dan kesejahteraan. Disini adalah dimana masyarakat dapat memperoleh bantuan dengan memenuhi syarat untuk pekerjaan atau bantuan keuangan dimasa saat sakit dan situasi sulit lainnya dalam kehidupan. Layanan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Norwegia juga bertanggung jawab atas administrasi keamanan sosial di Norwegia. Layanan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Norwegia tidak bertanggung-jawab untuk membuat kita yakin akan memiliki pekerjaan, meskipun satu dari tujuan mereka adalah untuk membuat lebih banyak orang dapat bergabung dengan angkatan kerja.¹⁰

Untuk melihat bagaimana pemerintah Norwegia memberikan jaminan sosial serta melaksanakan tugasnya sebagai negara kesejahteraan, secara kasat mata dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan pengeluaran negara. Berikut ini adalah tabel pendapatan dan pengeluaran Norwegia.

⁸“*The Norwegian welfare model - prosperous and sustainable?*”

<https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/the-norwegian-welfare-model---prosperous/id709446/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2015, pada pukul 13.45 Wita

⁹“Primary responsibilities as a welfare state”, diakses melalui, http://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=426&lang=en , pada tanggal 2 Desember 2014 pukul 03.04 Wita

¹⁰“Norwegian Labour and Welfare Service”, diakses melalui, http://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=435&lang=en, pada tanggal 2 Desember 2014 pukul 03.05 WitA

Tabel 2: Pendapatan Norwegia.

Revenue and Grants	746.8 billion	100 %
Tax revenue	429.56	57.5
Social contributions	155.27	20.8
Grants	2.07	0.3
Other revenue	159.9	21.4

Sumber : "Norway Encyclopedia" diakses dari <http://www.encyclopedia.com/topic/Norway.aspx>, pada tanggal 6 Desember 2014, pukul 19.37

Tabel 3: Pengeluaran Norwegia

Expenditures	605.3 billion	100 %
General public services	105.64	17.5
Defense	30.55	5.0
Public order and safety	15.8	2.6
Economic affairs	61.43	10.1
Enviromental protection	2.06	0.3
Housing and community amenities	0.94	0.2
Health	96.27	15.9
Recreational, culture, and religion	7.11	1.2
Education	39.27	6.5
Social protection	246.39	40.7

Sumber : "Norway Encyclopedia" diakses dari <http://www.encyclopedia.com/topic/Norway.aspx>, pada tanggal 6 Desember 2014 pukul 19.37

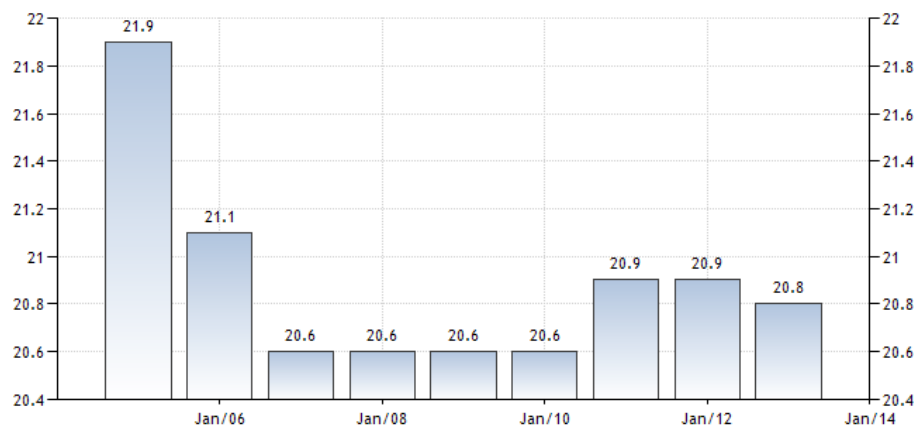
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan terbesar Norwegia berasal dari pajak yang diterapkan. Pajak yang diberlakukan menjadi sumber utama pendapatan negara itu dengan persentase angka 57.5 %. Dapat disimpulkan dari data ini, bahwa Norwegia sangat bergantung pada pajak yang diberlakukan di negaranya.

Pada tabel kedua, diperlihatkan tentang pengeluaran negara ini. Dapat dilihat, pengeluaran-pengeluaran terbesar Norwegia, terkait pada layanan umum publik, kesehatan, pendidikan dan yang paling besar adalah perlindungan sosial yang berupa tunjangan dan jaminan kepada masyarakatnya, yang pada saat itu sebesar 40.7% dari pengeluaran tahun itu. Sebagai Negara Kesejahteraan yang berbasas Sosial-Demokratik atau dengan model *Scandinavian Regime*, wajar

ketika belanja sosialnya sangat besar dikarenakan tunjangan yang diberikan, merata keseluruh masyarakatnya tanpa terkecuali.

Pada tabel berikut, diperlihatkan tentang persentase tingkat jaminan sosial dari tahun ke tahun. Meskipun ada penurunan namun secara nilai yang diberikan masih cukup besar.

Tabel 4: Tingkat Jaminan Sosial Norwegia Berdasarkan Persentase dari GDP

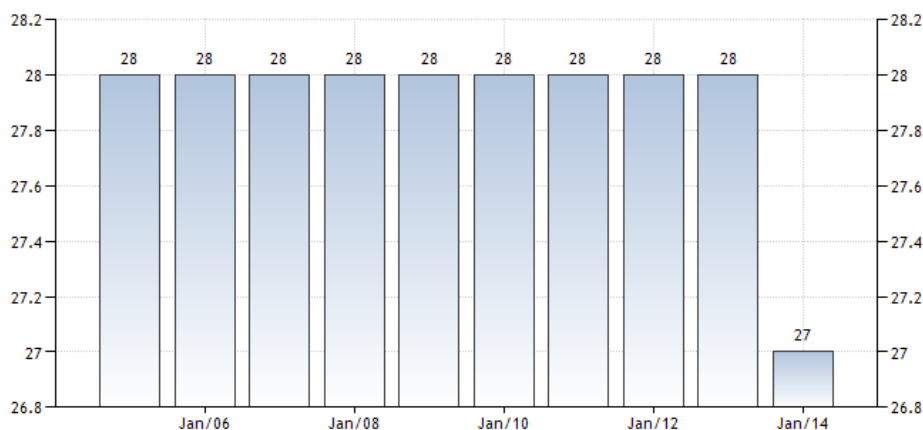


Sumber : *Tingkat Jaminan Sosial Norwegia*, diakses dari <http://id.tradingeconomics.com/norway/social-security-rate> pada tanggal 6 Desember 2014 pada pukul 20.05

Dari tabel ini, pengeluaran untuk jaminan sosial tidak pernah berada di bawah 20% dari tahun ke tahun. Hal ini memperlihatkan Norwegia sebagai negara kesejahteraan konsisten menjamin hak-hak yang telah diberikan pada warganya melalui tunjangan sosial.

Dari perbandingan tabel pendapatan dan pengeluaran diatas. Untuk memenuhi kewajiban menjamin keamanan sosial masyarakatnya, Norwegia membutuhkan dana yang besar. Dana yang besar itu diperoleh dari pemungutan pajak yang cukup besar pula. Dibawah ini adalah tabel mengenai tarif pajak bagi perusahaan dari tahun ke tahun.

Tabel 5: Tarif Pajak Perusahaan berdasarkan persentase dari penghasilan perusahaan



Sumber : :”Tarif Pajak Perusahaan Norwegia” diakses dari <http://id.tradingeconomics.com/norway/corporate-tax-rate> , pada tanggal 6 Desember 2014 pukul 20.05

Kedua tabel diatas adalah gambaran bagaimana Norwegia memberlakukan pajak yang besar baik bagi individu atau perusahaan di negaranya. Walaupun pada tabel diperlihatkan tren besaran pajak ini menurun disetiap tahunnya, namun besar pajak yang diberlakukan masih cukup tinggi. Ini menjadi bukti bahwa pajak masih dipercaya menjadi pemasukan negara yang efektif. Tidak hanya itu, dengan paham negara kesejahteraan Norwegia yang menerapkan konsep *cross class* yang berdasar pada pajak demi tercapainya keseimbangan kesejahteraan masyarakat di negaranya.

Selain pajak perusahaan dan perorangan, Pajak Pertambahan Nilai atau *Value Added Tax (VAT)* pada barang-barang serta jasa di norwegia juga cukup besar. Dikutip dari laporan *The 2012 worldwide VAT, GST and sales tax guide* bahwa:¹¹

Tarif PPN di Norwegia terdiri atas:

- Tarif Standar (Standard rate) : 25%
- Tarif yang dikurangi (Reduced Rates): 8% and 15%
- Zero rate (0%)

Pada laporan ini dijelaskan pula bahwa tariff standar berlaku pada seluruh barang dan jasa, terkecuali pada barang-barang tertentu. *The standard rate of VAT applies to all supplies of goods or services, unless a specific measure allows a reduced rate, the zero rate or an exemption.*¹²

¹¹ Ernst & Young, 2012, *The 2012 worldwide VAT, GST and sales tax guide, EYGM, hal.485*

¹²*Ibid*

Pajak atau tariff bea masuk untuk barang impor di Norwegia merupakan pemasukan yang paling penting bagi negara. Tarif dan bea masuk untuk barang dan jasa memiliki peran penting dalam keberlangsungan sistem di Norwegia. Setiap tahun, pemerintah Norwegia menetapkan besaran tariff dan bea masuk bagi setiap barang impor dan menerbitkannya dalam publikasi yang disetujui oleh parlemen Norwegia. Salah satu publikasi yang memuat informasi ini adalah publikasi yang diterbitkan oleh *Toll Customs* di Norwegia. Dalam lampiran dapat dilihat informasi mengenai beberapa produk, khususnya produk agrikultur memiliki tariff yang sanagat besar. Hal ini dilakukan demi mendorong pendapatan dan perekonomian Norwegia itu sendiri.

Pada tahun 2012, pemerintah Norwegia mengumumkan pemberlakuan tariff baru terhadap beberapa barang. Pemerintah Norwegia telah mengumumkan bahwa mereka akan menambah tariff impor untuk produk daging dan keju demi tujuan untuk meningkatkan pendapatan para petani dan peternaknya.¹³ Pemberlakuan ini bagi pemerintah Norwegia, dilakukan demi kesejahteraan para peternak di negaranya. Menteri Pertanian dan Pangan Norwegia Trygve Slagsvold Vedum, mengatakan bahwa perubahan ini berlaku mulai 1 Januari 2013 dan sangat penting demi memperkuat produksi makanan lokal.¹⁴ Kebijakan ini walaupun terkesan seperti aksi proteksi perdagangan, hal ini diperuntukkan demi kesejahteraan pelaku usaha di negaranya sendiri.

Pajak dan bea masuk yang diterapkan oleh pemerintah Norwegia dalam kebijakan tersebut memiliki nilai yang cukup besar. Berikut ini rincian beberapa produk agrikultur yang mengalami peningkatan nilai bea masuk sesuai dengan kebijakan tersebut.

¹³ Norway hikes import tariffs on cheese and meat, <http://ausfoodnews.com.au/2012/10/16/norway-hikes-import-tariffs-on-cheese-and-meat.html>

¹⁴ *Ibid*

Tabel 7: Bea masuk beberapa produk agrikultur di Norwegia

No.	Item / Jenis Barang	Nilai Bea Masuk	
		Persentase (beberapa item dalam Krone)	Kuantitas
1.	Sapi hidup	7500 Krone	/kg
2.	Kuda hidup	5000 Krone	/kg
3.	Ayam hidup (selain <i>Pure breeding</i>)	327%	/kg
4.	Kalkun hidup (selain <i>Pure breeding</i>)	555%	/kg
5.	Bebek hidup	555%	/kg
6.	Angsa hidup	555%	/kg
7.	Stik dan filet daging sapi	344%	/kg
8.	Daging domba utuh atau setengah utuh (beku)	429%	/kg
9.	Susu dan Krim (dengan kadar lemak melebihi 6%)	439%	/kg
10.	Produk Keju (belum terpasteursasi)	277%	/kg
11.	Telur Unggas (Telur untuk inkubasi)	427%	/kg

Sumber : Diolah dari TOLL CUSTOMS, *NORWEGIAN CUSTOMS TARIFF - Including the Statistical Nomenclature 2014*, annual document publication, 2014

Norwegia adalah negara pegunungan dengan musim dingin yang panjang dan musim panas pendek sehingga tidak cocok untuk produksi pertanian. Tingkat swasembada nasional yang tinggi tetap menjadi tujuan utama dalam politik Norwegia, dan tarif serta dukungan publik digunakan untuk melindungi dan mempromosikan produksi pangan nasional. Tarif tinggi pada impor dan subsidi pertanian sangat penting untuk swasembada nasional ini. Meskipun penurunan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir, pertanian masih mempekerjakan hampir 55.000 dan pengolahan makanan 35.000 orang pada

tahun 2010.¹⁵ Perlu juga diketahui bahwa eksportir dari luar memegang pemenuhan pangan Norwegia. Sembilan dari sepuluh eksportir terbesar produk pertanian ke Norwegia adalah anggota Uni Eropa, dengan tetangga Denmark dan Swedia sebagai dua negara yang dominan. Nilai impor mencapai tingkat rekor pada 2010 dengan total 36 miliar NOK.¹⁶

Disamping itu, Norwegia menerapkan subsidi yang cukup besar bagi para petani dan peternaknya. Jumlah pendapatan petani dan peternak di Norwegia cukup besar berasal dari negara. Jumlah yang ditunjukkan pada tahun 2013, jumlah ini mencapai 63%. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang ditampilkan dalam salah satu media Norwegia yang menyatakan, *Norwegian farmers rake in more in subsidies than those of any other country in the world, with 63 per cent of their income coming from the government, a new study from the OECD has reported.*¹⁷ Subsidi yang cukup besar ini secara umum digunakan untuk menstimulasi para petani dan peternaknya agar mampu bersaing, dan juga disamping itu menjamin kesejahteraan mereka.

Situasi di perikanan adalah kebalikan dari situasi di bidang pertanian. kondisi alam memadai dikombinasikan dengan zona perikanan besar memberikan akses industri untuk produk perikanan. Selain itu, selama 40 tahun terakhir industri akuakultur besar telah dikembangkan. Pada tahun 2009 nilai ekspor mencapai 44 miliar NOK, 26 miliar berasal dari budidaya dan 18 miliar dari perikanan. Ini adalah 6 persen dari ekspor barang dari Norwegia tahun itu.¹⁸ Hampir tidak ada subsidi untuk industri perikanan dan tidak ada tarif atas impor ikan.

B. Dinamika hubungan Norwegia sebagai Negara Kesejahteraan dengan EFTA

Dalam EFTA sendiri, banyak aturan-aturan yang disepakati oleh negara-negara anggota tidak dijalankan. Ketiga negara anggota ini, tidak selamanya mampu menjalankan aturan serta arahan dari EFTA dan Uni Eropa. Selama enam bulan terakhir, Norwegia telah gagal menjalankan 23 petunjuk Uni Eropa, sementara Islandia gagal 2,8% dari petunjuk dan Lichtenstein hanya 1,2%. Sedangkan rata-rata anggota Uni Eropa adalah 0,5%. Pada tahun 2014, ESA dikejar 14 kasus pengadilan atas nama EFTA tentang kurangnya pelaksanaan arahan pasar tunggal.¹⁹ Banyaknya pelanggaran dan kegagalan dalam menerapkan aturan rezim perdagangan pada tiap tahunnya, menjadikan ketiga

¹⁵Arild Aurvåg Farsund, *Norway: Agricultural exceptionalism and the quest for free trade*, International Political Science Association World Congress Madrid, Spain, July 8-12, 2010.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Norway has worlds highest farm subsidies, <http://www.thelocal.no/20130920/norway-has-worlds-highest-farm-subsidies>

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

negara ini, khususnya Norwegia, mendapat berbagai protes, bahkan ancaman dari UE melalui pengadilan EFTA.

Norwegia bukanlah bagian dari Uni Eropa. Alasannya sangat sederhana, yaitu masyarakat Norwegia menyatakan 'tidak' sebanyak dua kali dalam referendum seperti yang dijelaskan oleh pernyataan Rune Bjåstad, Dari Kementerian Komunikasi dan Kebudayaan Norwegia,²⁰ Alasan mengapa masyarakat menolak juga sangat jelas diungkapkan olehnya.

Menurut penuntutannya, keanggotaan dalam Uni Eropa menurut masyarakatnya akan mengganggu kedaulatan Norwegia, mengganggu industri perikanan dan agrikultur, serta keanggotaan ini akan meningkatkan sentralisasi yang sangat tidak sesuai dengan konsep kesetaraan dan negara kesejahteraan.²¹

Hal ini juga diperkuat dengan sikap pemerintahnya. Pemerintah Norwegia sangat menghormati keputusan referendum ini hingga dalam penerapannya dalam kebijakan ekonomi. Pemerintah Norwegia yang pro-UE, yang menjabat pada September 2013, beberapa kali menetapkan untuk hidup dibawah aturan pasar tunggal. Namun mayoritas parlemen menentang perubahan kebijakan-kebijakan hubungan Norwegia dan Uni Eropa.²²

Di samping fakta bahwa Norwegia bukan negara anggota Uni Eropa, namun Norwegia merupakan rekan perdagangan yang penting bagi Uni Eropa. Dari situs resmi delegasi Uni Eropa kepada Norwegia, menyatakan bahwa:²³

Norway is the EU's fifth most important trading partner, following US, China, Russia and Switzerland. EU is on the other hand Norway's most important trading partner, with 80 percent of Norwegian exports going to the EU, and 65 percent of Norwegian imports originating from EU member states.

Dalam perdagangan barang Norwegia mengeksport produk perikanan yang cukup besar. Norwegia merupakan pemasok ikan terbesar di Uni Eropa. Pada tahun 2012, Uni Eropa mengimpor Norwegia seafood senilai 3,8 Milliar Euro.²⁴

Dalam perjalanannya, banyak kasus dan ketidak-selarasan yang terjadi antara EFTA dan Norwegia. Hingga Januari 2013, laporan EFTA tentang Norwegia cukup mengejutkan. Media melaporkan, bahwa ada beberapa

²⁰ *Why Isn't Norway in EU*, dari <http://www.euronews.com/2013/03/29/norway-and-the-eu/> diakses pada tanggal 22 Januari 2014 pukul 13.59 Wita

²¹ *Ibid*

²² *Efta countries still not implementing eu rules fast enough says supervisor*, diakses dari <http://www.euractiv.com/sections/agriculture-food/efta-countries-still-not-implementing-eu-rules-fast-enough-says-supervisor> pada tanggal 17 Februari 2014 pukul 23.04 Wita

²³ Trade Relations EU-Norway, diakses dari http://eeas.europa.eu/delegations/norway/eu_norway/trade_relation/index_en.htm pada tanggal 17 Februari 2014 pukul 23.11 Wita

²⁴ *Ibid*

pelanggaran yang dilakukan oleh Norwegia. Contohnya, pada Januari 2013, EurActiv melaporkan bahwa Komisi mengeluhkan tentang Norwegia yang memberlakukan pajak lebih terhadap barang impor dari UE, dan telah gagal dalam mengimplementasikan lebih dari 400 petunjuk, yang secara efektif menghslnsngi pasar tunggal UE.²⁵ Dari pernyataan ini, diperlihatkan bahwa Norwegia melanggar perjanjian dengan memberikan pajak lebih terhadap barang-barang impor tertentu.

Selain itu Norwegia juga telah gagal mengimplementasikan 400 petunjuk EFTA. Salah satu jenis barang yang dibebankan pajak lebih, adalah produk keju sebanyak 277% dan bunga *hydrangea* 72%. Hal ini senada dinyatakan oleh media. *Norway had introduced a tax on specific imports, bringing the price of imported EU cheese up by 277%, and the the price of imported hydrangea flowers by 72%.*²⁶ Sehingga hal ini berujung protes dari negara-negara Eropa lainnya, bahkan ditangani dan diancam diberikan sanksi oleh *EFTA Court*.

Protes negara-negara Eropa ini salah satunya oleh Anggota Parlemen Eropa (*MEP*) asal Irlandia Selatan, Sean Kelly. Sean Kelly mengkritik “proteksionisme” Norwegia atas tarif impor hingga 426% pada beberapa produk makanan, walaupun dengan komitmennya dengan pasar tunggal.²⁷ Secara ekonomi, hal ini tentunya sangat mengganggu kestabilan Irlandia sebagai salah satu negara eksportir ke Norwegia. Sejak 1 Januari, eksportir Eropa untuk barang seperti keju, daging domba dan daging sapi harus menghadapi bea sebesar 277%, 426%, dan 344% masing-masing di pasar Norwegia.²⁸ Disamping itu Irlandia juga bergantung dengan ekspor ke Norwegia ini melihat nilai ekspor yang besar. Ekspor Irlandia ke Norwegia pada 2010 bernilai sekitar 11 Juta Euro, menurut Bord Bia.²⁹

Dalam kasus ini Parlemen Eropa dan Norwegia telah melakukan pembicaraan. Parlemen Eropa terlihat telah melakukan negosiasi dengan Norwegia demi mencapai peningkatan perdagangan bilateral produk agrikultur.³⁰ Dalam negosiasi ini dibahas mengenai aturan perdagangan produk agrikultur. Swedia adalah yang paling menonjol dari semua kritik terhadap kebijakan Norwegia yang menaikkan tarif impor untuk produk keju dan daging.³¹

Menanggapi kebijakan yang dilakukan Norwegia, beberapa negara di

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Norway's 'protectionist' tariffs on imports criticised by Irish MEP*

<http://www.irishexaminer.com/business/agri-business/norways-protectionist-tariffs-on-imports-criticised-by-irish-mep-227159.html>

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

Eropa telah melayangkan protes. Norwegia bukan anggota Uni Eropa (EU) , tapi hukum dan peraturan Uni Eropa sebagai bagian berlaku dari keanggotaannya di Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) . Norwegia kini telah membuat marah mayoritas wakil-wakil terpilih dari negara-negara Uni Eropa karena upayanya untuk melindungi pertanian Norwegia dari kompetisi Eropa. ³² Mereka sangat menyangkan dan mengecam tindakan proteksi yang dilakukan oleh Norwegia.

Impor keju dari Uni Eropa yang terkena tarif, termasuk Gouda dan cheddar, menjadi hampir tiga kali lebih mahal ketika tarif mulai berlaku 1 Januari membuat banyak merek dagang keluar dari pasar Norwegia .³³ Hal ini membuat politisi Uni Eropa menganggap bahwa kebijakan ini sangat merusak pasar di dalam Uni Eropa. Seperti yang diungkapkan dalam media Norwegia, *EU politicians claim the punitive tariffs have damaged trade and not least Norwegian consumers, and kept European cheeses out of the Norwegian market at a time when Europe needs all the trade it can get because of its economic crisis.*³⁴

Parlemen Uni Eropa telah menyerukan anjuran terhadap pemerintah Norwegia untuk memotong, tarif impor yang tinggi pada keju , daging dan tanaman hortensia. Anggota parlemen Uni Eropa, yang terpilih dari wakil-wakil seluruh negara di Uni Eropa, mengklaim tarif Norwegia berjumlah proteksionisme murni, menentang semangat perdagangan bebas dan *“not what the union expected from a friend and neighbour.”*³⁵

Pemerintah yang baru terpilih pada tahun 2013, berjanji untuk mengurangi pajak yang diterapkan oleh pemerintah sebelumnya terhadap barang-barang impor dari Uni Eropa, seperti daging dan keju.³⁶ Namun perkembangan hingga akhir 2014 Norwegia masih menerapkan tarif yang besar terhadap produk-produk agrikulturnya khususnya daging dan keju.³⁷ Hingga saat ini, belum ada perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Norwegia.

Uni Eropa juga telah memerintahkan Norwegia untuk mengurangi pajak daging dan keju. Menteri Uni Eropa Pertanian mengharapkan bahwa Norwegia akan membalikkan pajak persentase pada keju impor.³⁸ Juga dikatakan bahwa telah dilakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Norwegia. Namun Parlemen Norwegia tidak sepenuhnya mendukung permintaan ini. Partai Liberal Kiri dan Partai Demokrat Kristen telah mengumumkan bahwa mereka tidak

³² “EU Blasts Norway’s Protectionism”, diakses dari <http://www.newsenglish.no/2013/07/05/eu-blasts-norways-protectionism/> pada tanggal 17 Februari 2014 pukul 16.55

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ <http://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/norway-promises-to-reduce-tax-on-imported-eu-meat-and-cheese/>

³⁷ Lihat lampiran “TOLL CUSTOMS”

³⁸ *EU orders Norway to reverse tax on imported cheese,* <http://www.norwaypost.no/index.php/business/general-business/29446-eu-orders-norway-to-reverse-tax-on-imported-cheese>

ingin mendukung pembalikan dari pajak impor karena dapat menyebabkan lebih banyak rasa tidak aman bagi petani.³⁹ Akibatnya, pemerintah saat ini tidak memiliki mayoritas di parlemen dalam rangka untuk memenuhi permintaan Uni Eropa.

C. Pengaruh EFTA terhadap Norwegia sebagai Negara Kesejahteraan

EFTA sebagai salah satu rezim ekonomi yang berada di eropa, membawahi norwegia dan melibatkannya dalam pasar tunggal eropa. Aturan-aturan yang diterapkan oleh EFTA sedikit banyak mempengaruhi pelaksanaan sistem di Norwegia. EFTA memberlakukan berbagai aturan yang cukup menguntungkan bagi negaranya dan merugikan disatu sisi. Regulasi yang diterapkan EFTA tidak selamanya dipatuhi oleh Norwegia sebagai Negara anggota.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ada berbagai macam aturan dan petunjuk dari EFTA yang dilanggar dan tidak dipatuhi oleh Norwegia. Aturan-aturan itu termasuk tarif pajak barang impor yang masuk ke Norwegia hingga kebijakan pajak pertambahan nilai bagi perusahaan-perusahaan yang masuk ke Norwegia. Meski banyak hal yang menjadi pertentangan dalam hubungan Negara dan rezim ekonomi ini, EFTA tetap memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan ekonomi politik Norwegia baik dalam maupun luar negeri.

1. Pengaruh EFTA terhadap kondisi ekonomi politik dalam negeri Norwegia

Sebagai Negara kesejahteraan, Norwegia memberlakukan kebijakan yang memenuhi berbagai kebutuhan dasar masyarakatnya dalam bentuk tunjangan sosial. Pengeluaran tahunan tunjangan sosial ini menunjukkan nilai yang cukup besar, yaitu hingga 40,7 % dari total pengeluaran tiap tahunnya. Bentuk tunjangan sosial ini meliputi tunjangan pendidikan kesehatan, pensiunan, serta tunjangan bagi angkatan tuna-karya. Berbagai macam tunjangan ini membutuhkan sumber dana yang cukup besar.

Sumber pendapatan yang paling besar dalam menutupi biaya dan belanja sosial ini, berasal dari pajak. Hal ini didukung dengan doktrin sistem *welfare state* yang dianut oleh Norwegia, yaitu pola *cross class* yang diterapkan di masyarakatnya. Besaran pajak individu dan pajak yang dibebankan dalam berbagai produk barang dan jasa, tidak serta merta hanya menjadi pemasukan Negara. Pajak yang lebih besar ditanggung oleh kelompok kelas ekonomi yang lebih tinggi, kemudian disalurkan secara merata keseluruh penduduk, tidak hanya kepada yang kurang mampu. Sehingga pola lintas kelas atau *cross class*

³⁹ *Ibid*

yang diterapkan mampu menyejahterakan seluruh masyarakat dengan peran serta dari Negara.

Dengan gambaran proses diatas, EFTA memiliki peran penting dalam mempengaruhi kelangsungan sistem ini. EFTA yang menerapkan berbagai macam aturan mengenai tarif, pajak dan aturan perdagangan lainnya memegang peranan penting dalam penentuan kebijakan ekonomi di Norwegia secara lebih lanjut.

Norwegia menjalankan sistem negara kesejahteraan *The Scandinavian Regime* berdasar pada pajak yang besar bagi pembiayaannya. Pemberlakuan aturan-aturan EFTA akan mempengaruhi sistem negara kesejahteraan ini. Sebelumnya berikut ini kelebihan dan kekurangan sistem negara kesejahteraan Norwegia, yaitu model *Scandinavian Regime*:⁴⁰

Kelebihan dari model *Scandinavian Regime*:

- a. Universalitas dapat mendorong dukungan dari penduduk
- b. Tunjangan yang tinggi, jasa dibedakan
- c. Efek kerja (jasa)
- d. Mengurangi perpecahan sosial

Kekurangan dari model *Scandinavian Regime*:

- a. Administrasi yang sangat kompleks
- b. Mahal dan birokratis
- c. Beban pajak yang tinggi
- d. Orientasi pemerintah yang kuat
- e. Tekanan pada anggaran diakibatkan biaya yang tinggi

Dengan kelebihan dan kekurangan ini, telah mencerminkan sistem ini sangat bergantung dari pembiayaan pajak.

Namun disatu sisi, secara umum EFTA melihat pajak sebagai hambatan perdagangan yang nyata. Perpajakan Norwegia cukup tinggi untuk pajak pertambahan nilai untuk mendukung sistem ini, akan tetapi untuk pajak atau tariff bea masuk, Norwegia memberlakukan pajak yang beragam, bahkan beberapa barang tidak dikenakan pajak bea masuk. Hal ini cukup bertentangan dengan salah satu syarat pelaksanaan sistem ini, yaitu pembiayaan dari pajak.

Selain itu, konsep *Scandinavian regime* ini juga berusaha untuk meramaikan pasar dan membentuk solidaritas antar-kelas demi mengembangkan sistem kesejahteraan di negaranya. Artinya tidak hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses pasar, namun diusahakan bahkan untuk pihak yang sulit mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu bersaing.

Dengan aturan perdagangan bebas yang diterapkan oleh EFTA, diperkirakan akan mempengaruhi pendapatan petani dan peternak di Norwegia.

⁴⁰ How to Conceptualize the Welfare State”, diakses dari <http://www.pitt.edu/~heinisch/concept.html>, pada tanggal 17 September 2014, pukul 22.33 Wita.

Apalagi dengan melihat kondisi alam Norwegia yang kurang begitu cocok dengan pertanian, maka pendapatan petani adalah poin penting dalam menyejahterahkan rakyatnya. Dengan kondisi ini, tentunya para petani dan peternak lokal di Norwegia tidak akan dengan mudah bersaing dengan negara eksportir tetangga yang menghasilkan produk agrikultur yang lebih besar. Dengan nilai impor yang cukup besar, bisa dikatakan Norwegia khawatir dengan nasib para petaninya yang akan sulit bersaing dengan produk agrikultur dari luar Norwegia.

Pengaruh perdagangan bebas sebenarnya memiliki perbedaan kontras dengan sistem negara kesejahteraan yang diterapkan oleh Norwegia. Perdagangan bebas yang berdasar pada negara yang tidak terlalu turut campur tangan dalam kebijakan pasar, tidak sesuai dengan sistem negara kesejahteraan ini yang mengindikasikan adanya orientasi pemerintah yang kuat dalam mengatur distribusi kesejahteraannya. Namun disisi lain, pola ini telah berjalan dan memastikan distribusi kesejahteraan merata keseluruhan penduduk selama bertahun-tahun. Pengaruh EFTA berkuat pada tarif perdagangan pajak dan birokrasi perusahaan asing serta persaingan pasar yang besar, menjadikan adanya tarik-menarik kepentingan dan kebijakan dengan pemerintah Norwegia.

Perbedaan pandangan terhadap sistem ekonomi ini, menjadikan banyaknya terjadi konflik kepentingan dan kebijakan diantara kedua belah pihak. Pengaruh secara langsung integrasi ekonomi terhadap stabilitas ekonomi politik secara statistik bisa dikatakan agak sulit untuk ditunjukkan. Secara domestik, sebagai negara kesejahteraan, besaran pengeluaran belanja sosial secara langsung tidak terpengaruh dengan adanya integrasi ekonomi ini. Apalagi dari tren dari tahun ke tahun belanja sosial Norwegia walaupun menurun, namun tidak signifikan. Besaran belanja sosial masih berada di kisaran 20% dari GDP Norwegia. Efek secara langsung untuk nilai ini tidak terlalu diperlihatkan. Namun bagi kebijakan turunannya pada perdagangan seperti tariff bea masuk, subsidi, dan bentuk proteksi mengalami pengaruh yang signifikan.

Argumen yang dapat diambil dari fenomena ini adalah bagaimana Norwegia mampu mempertahankan dukungan publik dari masyarakatnya dengan berbagai aturan perdagangan dari EFTA. Masyarakat Norwegia telah menjalankan dan memenuhi berbagai syarat kewarganegaraannya. Membayar pajak yang tinggi baik pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai di hampir semua barang, diikuti dengan kepercayaan oleh masyarakat terhadap peran negara mendistribusikan dan melindungi kesejahteraan mereka. Faktor peran negara dalam membuktikan penjaminannya terhadap penduduknya, membuahkan kebijakan yang cukup memberikan masalah terhadap negara-negara lain yang tergabung dalam EFTA dan Uni Eropa.

Pengaruh yang paling tampak dari fenomena EFTA terhadap Norwegia ini, adalah dengan sistem ekonomi politik Norwegia yang menganut sistem

negara kesejahteraan adalah adanya kesan diskriminasi terhadap peran asing dalam perdagangan. Namun hal ini dilakukan adalah demi mementingkan kesejahteraan penduduknya terlebih dahulu, agar kepercayaan dan dukungan publik terus diberikan untuk melestarikan sistem negara kesejahteraan ini.

2. Pengaruh EFTA dalam kebijakan perdagangan luar negeri Norwegia

Bentuk-bentuk aturan umum yang diterapkan seperti pengurangan dan penghilangan pajak bea masuk barang dan hambatan lainnya adalah semangat utama rezim ekonomi ini. Aturan umum yang berlaku pada negara-negara anggota EFTA ini harus dipatuhi agar negara-negara tersebut tetap memiliki akses dalam pasar tunggal Eropa. Bagi negara-negara seperti Norwegia, Islandia dan Liechtenstein, EFTA adalah jalan masuk untuk bergabung dalam pasar tunggal Eropa tanpa harus tergabung dalam Uni Eropa.

Dalam pasar tunggal Eropa, Norwegia diuntungkan dalam beberapa bidang. Salah satunya adalah bidang perikanan. Seperti yang diketahui, Norwegia adalah penghasil produk perikanan yang sangat besar di Eropa. Dari hasil ekspor ini, Norwegia memperoleh pemasukan yang cukup besar bagi negaranya melalui perdagangan internasional. Keuntungan dari ekspor ini menjadi faktor yang penting dalam keterlibatan Norwegia dalam pasar tunggal Eropa. Arus barang dan jasa yang bebas hambatan juga menjadi alasan utama Norwegia tetap bergantung pada pasar tunggal Eropa untuk produk perikananannya. Bisa dikatakan bahwa hilangnya hambatan perdagangan bagi produk perikanan Norwegia dalam pasar tunggal Eropa adalah alasan utama Norwegia untuk tetap masuk dan bertahan dalam integrasi ekonomi dengan pasar Uni Eropa.

Dalam hubungan dagang Norwegia dan Uni Eropa serta negara lain secara global, EFTA/EEA memegang peran penting. EFTA menyediakan jalur perdagangan yang bebas hambatan ke dalam pasar tunggal Eropa, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan oleh Norwegia tiap tahunnya, memiliki pasar yang luas di Eropa dan tanpa hambatan pajak, bea masuk dan birokrasi yang rumit. EFTA memuat aturan yang mengontrol tiap negara agar tetap berada dalam semangat pasar bebas yang diinginkan liberalisasi perdagangan yang dijalankan di pasar tunggal Eropa. Dengan tanggung jawab yang diembannya, EFTA memiliki fungsi utama demi melibatkan negara-negara yang terintegrasi didalamnya untuk mengakses berbagai hubungan perdagangan bebas dengan negara-negara yang telah sepakat bekerjasama.

Dengan campur tangan EFTA, Norwegia secara langsung terikat dengan aturan dalam asosiasi integrasi ekonomi ini. Segala aturan yang berada dalam rezim ini, merupakan keharusan untuk dipatuhi oleh Norwegia. Hal ini dilakukan oleh EFTA agar Norwegia tetap memiliki komitmen untuk mematuhi norma-norma pasar bebas yang telah ditetapkan negara-negara yang telah bersepakat.

Dengan adanya dasar aturan ini, diharapkan bagi Norwegia agar

melaksanakan pola perdagangannya sesuai dengan arahan yang disepakatinya. Pada dasar aturan yang pertama, Norwegia telah memenuhi kriteria sebagai negara yang menyediakan barang-barang bagi perdagangan bebas, khususnya yang terbesar adalah pada produk perikanan dan kelautan. Dengan menyediakan dan menyuplai barang ke Uni Eropa, hal ini merupakan syarat sekaligus keuntungan bagi suatu negara yang terlibat perdagangan bebas. Norwegia memanfaatkan pola perdagangan ini dengan mengeksport produk perikanan tanpa tariff sama sekali terhadap komoditas eksportnya. Dapat dikatakan bahwa dengan memanfaatkan asosiasi integrasi ekonomi EFTA, Norwegia mampu mengembangkan pemasaran produknya, khususnya produk kelautan dan perikanan yang merupakan bidang industri yang cukup besar di Norwegia.

Pada poin yang kedua, negara-negara EFTA diharuskan meningkatkan akses pasar terhadap produk-produk pertanian. Artinya, dalam kegiatan perdagangan internasional, akses terhadap produk-produk agrikultur tidak dibatasi atau dihambat. Baik dalam menyuplai produk agrikultur ke luar negaranya, maupun mengimpor serta memasukkan produk agrikultur negara lain dalam pasarnya. Dalam melaksanakan dasar aturan kedua dari EFTA ini, Norwegia terlihat belum mampu menerapkan aturan ini secara komprehensif. Pada kenyataannya, diluar komitmen Norwegia dalam menyetujui area perdagangan bebas ini, Norwegia masih memberlakukan tarif bea masuk yang sangat besar terhadap produk-produk agrikulturnya. Disamping itu ekspor pertanian juga bukan tujuan utama Norwegia, sehingga produk pertanian difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan domestik saja.

D. Pola kebijakan Norwegia dalam menghadapi EFTA

Dengan berbagai bentuk aturan dan petunjuk yang diberlakukan oleh EFTA, perilaku yang ditunjukkan Norwegia tentu saja tidak akan selalu sejalan dengan rezim pasar bebas ini. Sebagai Negara kesejahteraan yang menerapkan sistem ekonomi yang berdasar kepada kesejahteraan yang merata pada masyarakatnya, Norwegia bisa dikatakan akan sulit menyesuaikan sistem ekonominya dengan logika kapitalisme dari pasar bebas. Semangat pasar bebas memandang pajak, tarif bea masuk, serta keterlibatan negara dalam pasar sebagai hambatan dalam perdagangan, sedangkan bagi Norwegia memandang ketiga hal tersebut sebagai hal yang vital dalam membangun ekonomi dalam negeri mereka. Demi mempertahankan dan beradaptasi dengan kedua sistem ekonomi ini, ada berbagai macam pola kebijakan yang dilakukan Norwegia dalam menghadapi integrasi ekonomi dalam bentuk asosiasi perdagangan EFTA.

1. Kecenderungan Norwegia melakukan proteksi

Dalam beberapa kasus, Norwegia menerapkan pajak bea masuk yang terhadap barang-barang impor yang masuk. Tidak hanya dari negara di luar

Eropa, bahkan pada negara-negara Eropa yang tergabung dalam integrasi ekonomi EFTA dan Uni Eropa. Alasan menyelamatkan pasar dan produsen lokal serta menambah pemasukan negara, menjadi motivasi utama Norwegia dalam memberlakukan pajak bea masuk yang cukup tinggi ini. Namun hal ini bias dikatakan wajar jika kita melihat lagi sifat sistem negara kesejahteraan.

Dalam hal ini sistem negara kesejahteraan yang diterapkan di Norwegia, berusaha untuk menghilangkan jarak antara masyarakatnya dengan pasar. Artinya para produsen lokal yang berada di Norwegia, sebisa mungkin diberikan bantuan melalui kebijakan Negara agar bisa tetap terlibat dan bersaing dengan pengusaha besar dari luar Norwegia. Dilihat dari ideologi ekonomi yang diterapkan, untuk Norwegia sendiri, hal ini wajar dilakukan demi kesejahteraan masyarakatnya sendiri.

Pada kasus terakhir yang hangat menjadi pembicaraan dan mengundang protes negara-negara Eropa lainnya, Norwegia terlihat cenderung melakukan proteksi terhadap produk-produk pertaniannya. Besaran tarif yang cukup tinggi terhadap beberapa barang-barang pertanian, mencerminkan ada pengecualian yang dilakukan oleh Norwegia terhadap produk agrikulturnya. Dengan besaran pajak yang cukup besar ini, bisa dipastikan produk-produk pertanian dan peternakan dari negara Eropa lain akan sulit bersaing dengan produk lokal bahkan cenderung akan sulit masuk ke dalam pasar Norwegia.

Pada kasus ini, negara-negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa, bahkan Uni Eropa itu sendiri melayangkan protes. Jika melihat dari sisi moral yang dipahami oleh logika integrasi ekonomi atau pasar bebas, tentunya hal ini adalah pelanggaran dan memberatkan negara-negara lain yang tergabung dalam integrasi dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

Manuver ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Norwegia ini, telah mendapatkan protes dan kritik dari berbagai pihak. Hal ini membuktikan bahwa Norwegia telah benar-benar melakukan usaha proteksi terhadap produk-produknya. Dari sisi moral yang dipatuhi oleh perdagangan bebas, memandang usaha proteksi terhadap barang adalah suatu pelanggaran dan bertentangan dengan sistem pasar bebas yang diterapkan.

Kasus ini jika dilihat dari sudut pandang Norwegia sebagai negara kesejahteraan, merupakan kewajiban. Norwegia yang menerapkan sistem yang sebisa mungkin tidak menjauhkan masyarakatnya dari pasar dan kegiatan perdagangan, akan lebih mendukung usaha-usaha produsen lokal lebih dari pengusaha asing. Hal ini bahkan menjadi mayoritas pola berpikir perwakilan rakyat di parlemen Norwegia. Akibatnya, pemerintah saat ini tidak memiliki mayoritas di parlemen dalam rangka untuk memenuhi permintaan Uni Eropa.

Jika melihat poin-poin karakteristik negara kesejahteraan yang diterapkan Norwegia, kebijakan sosial dilakukan demi perlindungan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini, untuk melindungi kesejahteraan

petani dan peternaknya, Norwegia memberlakukan proteksi besar-besaran terhadap produk agrikultur yang akan masuk ke Norwegia. Disamping tarif yang diberlakukan Norwegia adalah untuk pemasukan negaranya yang kembali digunakan untuk menambah belanja sosial dan kebutuhan lainnya.

Dengan kondisi ini, EFTA sebagai badan yang bertugas menghilangkan segala jenis bentuk proteksi, baik yang terlihat maupun tidak, melihat Norwegia sebagai negara yang melakukan pelanggaran. Laporan yang mengindikasikan Norwegia melanggar aturan mengenai tarif, proteksi dan lebih dari 400 arahan dari EFTA dan Uni Eropa, menciptakan konflik tersendiri bagi Norwegia dan negara-negara yang tergabung dalam EFTA dan Uni Eropa.

2. Subsidi pertanian di Norwegia

Norwegia menerapkan subsidi yang cukup besar bagi para petani dan peternaknya. Jumlah pendapatan petani dan peternak di Norwegia cukup besar berasal dari negara. Subsidi yang cukup besar ini secara umum digunakan untuk menstimulasi para petani dan peternaknya agar mampu bersaing, dan juga disamping itu menjamin kesejahteraan mereka. Melihat perlakuan berbeda terhadap kedua pelaku bisnis ini tentu saja melanggar aturan EFTA

Dengan melihat kembali sistem negara kesejahteraan yang diterapkan oleh Norwegia subsidi yang dilakukan demi kesejahteraan masyarakatnya akan dianggap diskriminasi dan proteksi oleh negara-negara yang tergabung dalam EFTA dan Uni Eropa. Tetapi bagi Norwegia dukungan negara terhadap pelaku bisnis dalam negeri dalam bentuk subsidi yang sangat besar adalah kewajaran bagi sistem negara kesejahteraan yang diterapkannya

PENUTUP

Penerapan pola integrasi ekonomi terhadap negara kesejahteraan dalam pembahasan ini, menunjukkan kedua sistem ini saling tarik-menarik. Pengaruh sistem integrasi ini menunjukkan konflik antar kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah Norwegia dan Negara-negara yang tergabung dalam EFTA dan Uni Eropa. Pembahasan umum mengenai masalah ini, memperlihatkan hubungan yang tidak saling mendukung karena adanya perbedaan fundamental mengenai ideologi ekonomi politik yang dipahami oleh masing-masing sistem.

Sistem negara kesejahteraan yang diterapkan Norwegia berdasar atas pemenuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakatnya, menjadikan pajak dan tariff perdagangan sebagai pemasukan utamanya demi menjalankan sistem ini. Tidak hanya pajak dalam negeri, hal ini juga berpengaruh terhadap perlakuan Norwegia terhadap barang impor negaranya. Sebaliknya, dalam hubungan dagang Norwegia dan Uni Eropa serta negara lain secara global, EFTA/EEA memegang peran penting. EFTA menyediakan jalur perdagangan yang bebas hambatan ke dalam pasar tunggal Eropa, sehingga barang dan jasa

yang dihasilkan oleh Norwegia tiap tahunnya memiliki pasar yang luas di Eropa dan tanpa hambatan pajak, bea masuk dan birokrasi yang rumit. EFTA memuat aturan yang mengontrol tiap negara agar tetap berada dalam semangat pasar bebas yang diinginkan liberalisasi perdagangan yang dijalankan di pasar tunggal Eropa.

Pengaruh ini juga bisa dilihat melalui perdagangan luar negeri Norwegia. Dengan menjadi anggota EFTA pasar Norwegia terbuka luas, khususnya bagi perikanan. Namun dengan adanya pasar bebas ini, impor terhadap produk pertanian menjadi cukup besar, sehingga Norwegia yang tidak terlalu mampu bersaing dalam bidang agrikultur memberlakukan tariff yang besar bagi impor produk agrikulturnya.

Norwegia yang melakukan usaha proteksi terhadap produk-produknya khususnya produk agrikultur, menjadi masalah utama dalam hubungan ini. Dari sisi moral yang dipatuhi oleh perdagangan bebas, memandang usaha proteksi terhadap barang adalah suatu pelanggaran dan bertentangan dengan sistem pasar bebas yang diterapkan. Dilain sisi, kasus ini jika dilihat dari sudut pandang Norwegia sebagai negara kesejahteraan, merupakan kewajiban. Norwegia yang menerapkan sistem yang sebisa mungkin tidak menjauhkan masyarakatnya dari pasar dan kegiatan perdagangan, akan lebih mendukung usaha-usaha produsen lokal lebih dari pengusaha asing.

Untuk mendukung hal itu, Norwegia bahkan tetap menerapkan subsidi yang besar pada bidang yang sama. Subsidi yang berkisar hingga 63% dari pemerintah juga merupakan hambatan perdagangan menurut liberalisasi perdagangan. Kebebasan pasar bisa dikatakan akan sulit diterapkan pada negara yang lebih mendahulukan kepentingan domestik dan pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan, karena masyarakat pada negara kesejahteraan khususnya yang menerapkan sistem *Scandinavian Regime* ini menghilangkan kesenjangan antar kelas melalui sistem *cross class*, meramaikan pasar secara merata, dan tidak terpaku pada persaingan individu layaknya liberalisasi perdagangan. Hal ini terjadi karena adanya otoritas penuh oleh negara dan dukungan publik yang percaya akan distribusi kesejahteraan oleh pemerintahnya. Pelayanan sosial yang diberikan pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak-hak warga negara dalam merespon konsekuensi-konsekuensi kapitalisme. Sehingga dari hal ini, dapat dikatakan bahwa konsep negara kesejahteraan adalah salah satu usaha yang dilakukan dalam merespon konsekuensi-konsekuensi kapitalisme.

Argumen yang dapat diambil dari fenomena ini adalah bagaimana Norwegia mampu mempertahankan dukungan publik dari masyarakatnya dengan berbagai aturan perdagangan dari EFTA. Masyarakat Norwegia telah menjalankan dan memenuhi berbagai syarat kewarganegaraannya. Membayar

pajak yang tinggi baik pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai di hampir semua barang, diikuti dengan kepercayaan oleh masyarakat terhadap peran negara mendistribusikan dan melindungi kesejahteraan mereka. Faktor peran negara dalam membuktikan penjaminannya terhadap penduduknya, membuahkan kebijakan yang cukup memberikan masalah terhadap negara-negara lain yang tergabung dalam EFTA dan Uni Eropa. Sehingga integrasi ekonomi yang sifatnya tidak holistik seperti free trade area, menimbulkan banyak ketidakcocokan. Hal ini juga memperlihatkan sistem integrasi ekonomi tidak serta merta bisa diterapkan secara mulus pada sistem negara tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- _____, Advokatfirmaet Grette DA, 2014, *Doing Bussiness In Norway*, Oslo Filipstad Brygge 2
- _____, KMPG LAW ADVOKATFIRMA DA , 2013, *Tax Facts Norway 2013: A survey of the Norwegian Tax System*, Oslo, KPMG AS,.
- Balassa, Bela.,1961,*The Theory of Economic Integration*, Illinois, R.D. Irwin,
- Coleman,William D. & Geoffrey R.D. 1998, *Underhill. Regionalism & Global Economic Integration*, London: Routledge.
- Gauss, Gerald F. & Chandra Kukhathas “*Handbook Teori Politik*”, 2013,Yogyakarta, Nusamedia
- Johnson ,Paul M., 2003, “*Kamus Ekonomi-Politik*”, Jakarta, Penebit TERAJU
- Nye, Jr ,Joseph S., 1969,*International Regionalism*, Boston Little Brown & Co
- Powell ,Jason L., John Hendricks, 2009, “*The Welfare State & Post-Industrial Society*”, New York, Springer Science&Business Media
- Salvatore, Dominick, 1997, *International Economics*, New York, John Wiley&Sons
- Shand, Alexander H., 1990, “*Free Market Morality : The political Economy of Austrian School*”, London, Routledge
- Strange ,Susan, 1988 “*States and Markets*”, London : Pinter Publisher
- Suparman, Nuraeni, dkk, 2010, *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Pustaka pelajar
- Spicker ,Paul, 2002, *Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths*, London:Catalyst
- Todaro, Michael P. & Stephen C. Smith, 2006, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*, terj. Andri Yelvi, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Winarno, Budi, 2011, *Isu-Isu global Contemporer*, Yogyakarta, CAPS

Jurnal, artikel dan dokumen resmi :

- _____, TOLL CUSTOMS, 2014, *NORWEGIAN CUSTOMS TARIFF - Including the Statistical Nomenclature 2014*, annual document publication

- _____, Advokatfirmaet BA-HR DA, 2013, Annual Tax Newsletter 2013, annual document publication
- Arild Aurvåg Farsund, *Norway: Agricultural exceptionalism and the quest for free trade*, International Political Science Association World Congress Madrid, Spain, July 8-12, 2010.
- Galtung, Johan. 1968, "A Structural Theory of Integration." *Journal of Peace Research*. Vol. 5 No. 4.
- Harris, John, "State Social Work and Social Citizenship in Britain: From Clientelism to Consumerism", 1999, dalam *The British Journal of Social Work*, Vol.29, No.6
- Ridwan. "Dampak Integrasi Ekonomi terhadap Investasi di Kawasan ASEAN: Analisis Model Gravitasi", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 5, no 2
- Suharto, Edi. 2006, *Peta dan Dinamika Welfare-State di Beberapa Negara*.
- Gough. Ian 2005. "European Welfare States: Ex Planations And Lessons For Developing Countries"
- Wildasin, David E., 2004, "Economic Integration and Welfare State", Martin School of Public Policy, University of Kentucky, CES forum 4

Internet:

"Norway's 'protectionist' tariffs on imports criticised by Irish MEP" diakses dari <http://www.irishtaxaminer.com/business/norways-protectionist-tariffs-on-imports-criticised-by-irish-mep-227159.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2013 pada pukul 22.17 Wita

"Norway, the EEA Agreement and Norways Other Agreement with the EU" dari http://www.eu-norway.org/,_news1/Norway-the-EEA-Agreement-and-Norways-other-agreements-with-the-EU/#_UnvZ_BCpdic, diakses pada tanggal 20 Oktober 2013 pukul 22.30 wita

"The World Factbook, Library : Norway" diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/no.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober pada pukul 22.41 Wita

"EU threatens to punish Norway for breaching EEA agreement" dari <http://www.euractiv.com/consumers/eu-threatens-punish-selfish-norw-news-517431>, diakses pada tanggal 20 Oktober pada pukul 22.59 Wita

"How to Conceptualize the Welfare State", diakses dari <http://www.pitt.edu/~heinisch/concept.html>, pada tanggal 17 September 2014, pukul 22.33 Wita.

"The European Free Trade Association", diakses dari <http://www.EFTA.int/about-EFTA/european-free-trade-association>, pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 01.22 Wita

"Introduction to the EFTA Court", diakses dari,

<http://www.eftacourt.int/the-court/jurisdiction-organisation/introduction/> , pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 01.47 Wita.

"Primary responsibilities as a welfare state", diakses melalui, http://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=426&lang=en , pada tanggal 2 Desember 2014 pukul 03.04 Wita

"Norwegian Labour and Welfare Service", diakses melalui, http://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=435&lang=en, pada tanggal 2 Desember 2014 pukul 03.05 Wita

Tarif Pajak Individu Norwegia, diakses dari <http://id.tradingeconomics.com/norway/personal-income-tax-rate> pada tanggal 6 Desember 2014 pada pukul 20.05 wita

Tarif Pajak Perusahaan Norwegia" diakses dari <http://id.tradingeconomics.com/norway/corporate-tax-rate> , pada tanggal 6 Desember 2014 pukul 20.05

Tingkat Jaminan Sosial Norwegia, diakses dari <http://id.tradingeconomics.com/norway/social-security-rate> pada tanggal 6 Desember 2014 pada pukul 20.05

"Norway Encyclopedia" diakses dari <http://www.encyclopedia.com/topic/Norway.aspx>, pada tanggal 6 Desember 2014 pukul 19.37

"The European Free Trade Association", diakses dari <http://www.EFTA.int/about-EFTA/european-free-trade-association> , pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 01.22 Wita

"EFTA Convention", diakses melalui <http://www.EFTA.int/EFTA-convention> , pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 01.25 Wita

"The EEA Agreement", diakses dari <http://www.efta.int/legal-texts/eea>, pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 23.00 Wita

"The Norwegian welfare model - prosperous and sustainable?" diakses dari, <https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/the-norwegian-welfare-model---prosperous/id709446/>, pada tanggal 19 Januari 2015, pada pukul 13.45 Wita

"Primary responsibilities as a welfare state", diakses dari, http://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=426&lang=en , pada tanggal 2 Desember 2014 pukul 03.04 Wita

"Norwegian Labour and Welfare Service", diakses dari http://www.samfunnskunnskap.no/?page_id=435&lang=en, pada tanggal 2 Desember 2014 pukul 03.05 Wita

Norway proposes zero vat rate for e newspapers and media, <http://www.accordancevat.com/norway-proposes-zero-vat-rate-for-e-newspapers-and-media/>

"Norway hikes import tariffs on cheese and meat", diakses dari, <http://ausfoodnews.com.au/2012/10/16/norway-hikes-import-tariffs-on->

[cheese-and-meat.html](#)

“VAT on the activities of foreign nationals in Norway”, diakses dari <https://www.altinn.no/en/Start-and-Run-a-Business/Operation/Direct-and-indirect-taxes/VAT-reporting/VAT-on-the-activities-of-foreign-nationals-in-Norway/>

“Efta countries still not implementing eu rules fast enough says supervisor”, diakses dari <http://www.euractiv.com/sections/agriculture-food/efta-countries-still-not-implementing-eu-rules-fast-enough-says-supervisor>

“Norway Changes in tax representation rules” diakses dari, <http://vatresource.com/en/News/News-Items/Norway---Changes-in-tax-representation-rules.html>

“Norwegian rules on VAT representatives in breach of the EEA Agreement” diakses dari <http://www.eftasurv.int/press-publications/press-releases/internal-market/nr/1756>

“Norway challenged efta vat representatives”, diakses dari <http://www.vatlive.com/european-news/norway-challenged-efta-vat-representatives/>

“Norway has worlds highest farm subsidies”, <http://www.thelocal.no/20130920/norway-has-worlds-highest-farm-subsidies>

“Why Isn’t Norway in EU”, diakses dari <http://www.euronews.com/2013/03/29/norway-and-the-eu/> pada tanggal 22 Januari 2014 pukul 13.59 Wita

“EU Blasts Norways Protectionism”, diakses dari <http://www.newsinenglish.no/2013/07/05/eu-blasts-norways-protectionism/> pada tanggal 17 Februari 2014 pukul 16.55

“Trade Relations EU-Norway”, diakses dari http://eeas.europa.eu/delegations/norway/eu_norway/trade_relation/index_en.htm pada tanggal 17 Februari 2014 pukul 23.11 Wita